



RENCANA AKSI TAHUN 2025

Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara

.....





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : James Alexander Kaihatu
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusti Ayu Putu Suwardani
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bitung, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

Gusti Ayu Putu Suwardani
NIP. 196610261990012001

James Alexander Kaihatu
NIP. 197709122010121003

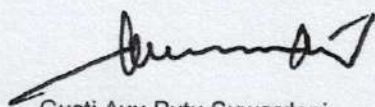
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sulawesi Utara	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Sulawesi Utara	3,6
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah		Rp. 15.522.810.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.093.627.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1.664.996.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 10.245.660.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 518.527.000,-

Bitung, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum



Gusti Ayu Putu Suwardani
NIP. 196610261990012001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Sulawesi Utara



James Alexander Kaihatu
NIP. 197709122010121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : James Alexander Kaihatu

Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bitung, 17 Januari 2025

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

James Alexander Kaihatu
NIP. 197709122010121003

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di wilayah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM Terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Sulawesi Utara	3,6 Indeks	Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.	Menyelenggarakan Pelatihan Kepada Pegawai Kementerian Hukum dan HAM diwilayah Kerja	15.522.810.000	2.666.724.000		TW I 1. Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Resiko Metode PJJ 2 Angkatan 2.Menyelenggarakan Pelatihan Impactful Communication Skil 2 Angkatan 3.Menyelenggarakan Pelatihan Profesional Publik Speaking 2 Angkatan 4.Menyelenggarakan COP untuk Jabatan Fungsional 5. MOOC Peran Strategi BSK 6. MOOC Manajemen Resiko	TW I	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan		
							3.083.674.000		TW II 1.Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi 2 Angkatan 2.Pelatihan Bahasa Inggris Metode PJJ 2 Angkatan 3.Webinar Kepegawaian 4 MOOC Pemasarakatan	TW II			

--	--	--	--	--	--

			5. MOOC Tentang Imigrasi					
			5.pelatihan Protokol 2 angkatan					
			6. Pelatihan LkjiP 2 Angkatan					
3.286.972.000		TW III	1.Menyelenggarakan Pelatihan ToT bagi Fasilitator Pelatihan Fungsional Analis Hukum 2.Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pelayanan Anak di LPKA Metode PJJ 3.Menyelenggarakan Pelatihan Pelatihan SPIP 4.Menyelenggarakan Pelatihan Assesment Resiko	TW III		Laporan Penyelenggaraan Pelatihan		
2.674.926.000		TW IV	1.Menyelenggarakan Pelatihan Legal Drafting 2.Menyelenggarakan Pelatihan FRAUD Metode PJJ 3.Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian 4.Menyelenggarakan Pelatihan Barang dan Jasa Metode PJJ 5.Menyelenggarakan Pelatihan Perancang Perundang – Undang 6.Menyelenggarakan Pelatihan ToT bagi Fasilitator Pelatihan Fungsional	TW IV		Laporan Penyelenggaraan Pelatihan		

									Perancang PerUndang- undangan					
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	100%			19.650.500		TW I	1. Melaksanakan Pencanangan zona Integritas 2. Melaksanakan Pemenuhan Data Dukung ERB B03	TW I		1. Laporan Pencanangan zona Integritas 2. Data duku ERB (LKE dan RKT)		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

									7. Memenuhi Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana Perkantoran		7. Laporan Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana Perkantoran		
									8. Melaksanakan Administrasi dan pembinaan Kepegawaian		8. Laporan Administrasi dan pembinaan Kepegawaian		
									9. Melaksanakan pengelolaan program dan anggaran		9. Laporan pengelolaan program dan anggaran, dan Dokumen Perencanaan		
									10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja		10. Laporan pemantauan dan evaluasi kinerja		
									11. Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan		11. Laporan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan		